



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower, Lantai 14 - 17 Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTAN AUDIT KEBIJAKAN SDM
DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SDM BPKH
Nomor: B. 26007/BPKH/BP/A7.4/03/2024**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Audit Kebijakan SDM & Penyusunan Standar Operasional Prosedur SDM BPKH
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
1. mengkaji dan mempelajari Misi Organisasi BPKH, mengetahui proses bisnis di organisasi BPKH saat ini dan memetakan fungsi-fungsi kritikal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan sasaran organisasi;
 2. mempelajari kebijakan SDM saat ini dan mempopyeksikan rencana perbaikan yang selaras dengan proses bisnis organisasi;
 3. melakukan komparasi kebijakan SDM dengan regulasi pemerintah, regulasi internal BPKH, dan/atau regulasi eksternal;
 4. melakukan gap analisis kebijakan SDM dengan membandingkan kondisi ideal dan kondisi saat ini;
 5. menyampaikan laporan hasil audit kebijakan SDM dan usulan dokumen standar operasional prosedur (SOP) kepada Bidang SDM BPKH untuk mendapatkan masukan dan perbaikan;
 6. melakukan penyesuaian hasil audit kebijakan SDM dan dokumen standar operasional prosedur (SOP) jika diperlukan, sesuai masukan Bidang SDM.
- Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : Menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pengembangan SDM, dengan kualifikasi :
 - a) Pendidikan minimal strata dua (S-2) Magister Manajemen dan pengalaman kerja minimal 15 (lima belas puluh) tahun sebagai praktisi di bidang SDM pada instansi pemerintahan/BUMN/ perusahaan swasta/private;
 - b) Memiliki sertifikat keahlian atau pengalaman di bidang SDM, khususnya pengalaman audit SDM/pengembangan organisasi/penyusunan regulasi/pengembangan pegawai atau sejenisnya untuk mendukung paket pekerjaan tersebut.

- 2) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Manajemen SDM, dengan kualifikasi :
 - a) Pendidikan minimal strata dua (S-2) Magister Manajemen dan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun sebagai praktisi di bidang SDM pada instansi pemerintahan/BUMN/ perusahaan swasta/private;
 - b) Memiliki sertifikat keahlian atau pengalaman di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

- 3) 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi :
 - a) Pendidikan minimal strata satu (S-1) Hukum/Psikologi dan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai associate consultant di Bidang SDM minimal pada 3 (tiga) project yang berbeda;
 - b) Memiliki sertifikat keahlian atau pengalaman di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Pengadaan ini terbatas hanya untuk Pelaku Badan Usaha, dan memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 tentang Aktivitas Konsultan Manajemen.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender.

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket dengan 2 (satu) Keluaran (*Output*) berupa:

- a. Laporan hasil audit kebijakan SDM BPKH meliputi hasil reuiu dan evaluasi berbagai aspek yang terkait dengan SDM BPKH;
- b. Dokumen standar operasional prosedur (SOP) SDM berdasarkan hasil audit kebijakan SDM dan hasil identifikasi aturan turunan peraturan kepegawaian BPKH

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp244.050.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat vendor.pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal vendor.pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Selasa, 27 Maret – 2 April 2024	Rabu, 10.00 WIB	Selasa, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Selasa, 27 Maret – 2 April 2024	Rabu, 10.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Rabu – Kamis, 3 – 4 April 2024	Selasa, 10.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jumat - Rabu, 5 – 17 April 2024	Jumat, 12.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 18 April 2024	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2024

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

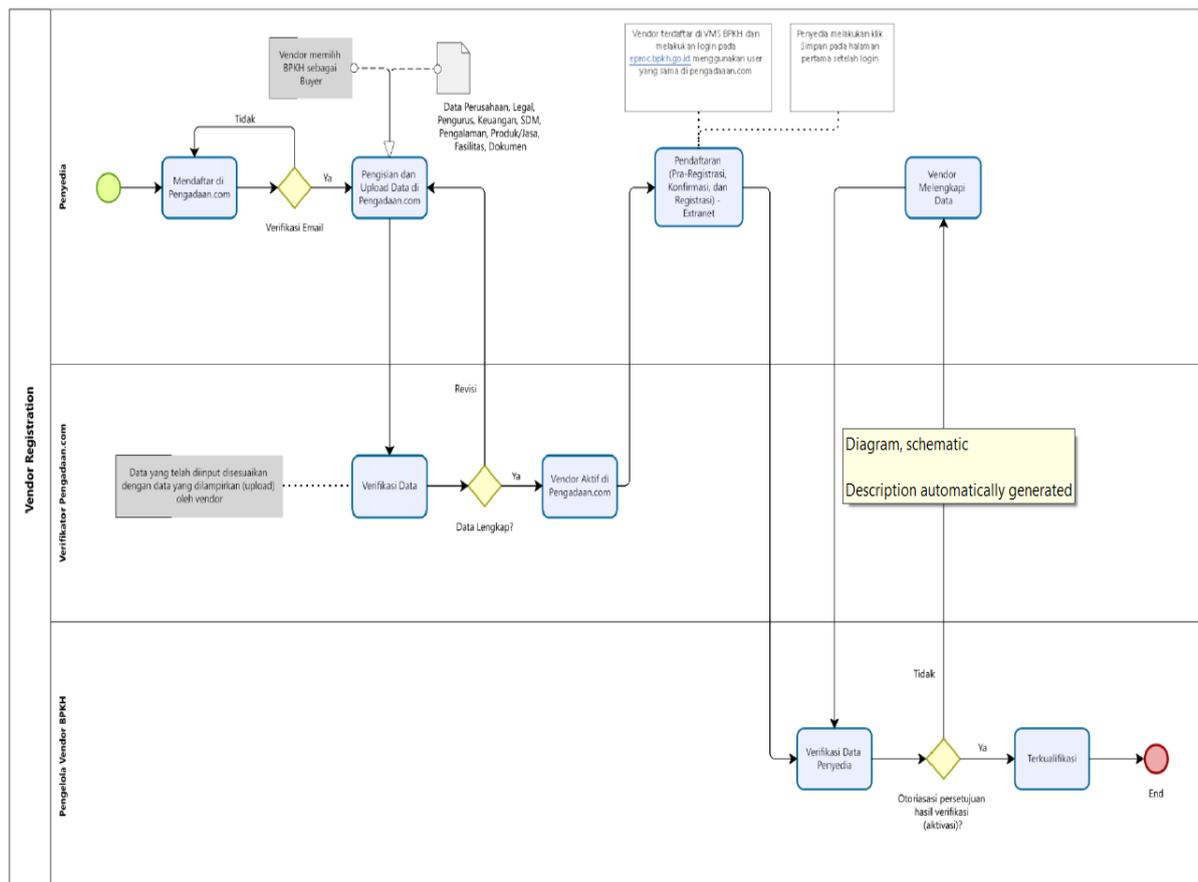
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 26007/BPKH/BP/A7.4/03/2024

Tanggal : 26 Maret 2024

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud, sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.